



KLIPING KORAN

Sumber : Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Surabaya Pos, Surya, Malang Post, Bhirawa, Suara Indonesia, Koran Pendidikan, Majalah Tempo, Majalah GATRA, Jawa Pos/ Radar Malang, Seputar Indonesia, Pena Pendidikan ...

Tahun : 2017
Bulan : JAN, FEB, MAR, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOV, DES
Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 hal

Dia berharap, pendidikan di Jatim bisa seperti Jerman. Dengan tidak adanya pendidikan gratis, dia menyatakan, pendidikan bisa lebih maju. "Sebab, sesungguhnya, Jatim maju karena faktor pendidikannya," imbuh mantan sekretaris daerah Provinsi Jatim itu.

Meski begitu, Karwo menegaskan, pihaknya tetap membantu siswa miskin yang berprestasi. Yakni, mengalokasikan 34 persen anggaran sekolah untuk siswa miskin berprestasi. Dana tersebut dihimpun dari pemerintah pusat sebanyak 50 persen, Pemprov Jatim menyiapkan 30 persen, sedangkan sisanya 20 persen dari kabupaten/kota. "Skema bantuan tersebut sudah berjalan di Jatim. Termasuk di Kota Malang," kata pejabat berkumis tebal tersebut.

Kepala Cabang Dinas Pen-

didikan Provinsi Jatim Wilayah Kota Malang dan Kota Batu Adi Prajitno menyatakan, saat ini memang tidak ada pendidikan yang gratis. "Beberapa waktu lalu, Pakde Karwo menyampaikan perihal tersebut (tidak ada pendidikan yang gratis)," kata Adi.

Menurut Adi, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua siswa. "Bagaimana bisa mendidik ge-

nerasi yang berpendidikan jika fasilitas tidak bisa dibagikan," tandasnya. Namun, Dia menjelaskan, bukan berarti tidak ada beasiswa. Beasiswa untuk peserta didik yang tidak mampu tetap disiapkan pemerintah. Sebab, beasiswa tersebut yang akan membayarkan biaya pendidikan siswa tidak mampu. "Meskipun tidak mampu, tetap bisa membayar dengan bantuan beasiswa," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tri Suharno menyatakan, siswa tidak mampu tetap harus bisa sekolah meski tidak gratis. Cara yang digunakan dengan sistem studi silang. "Siswa yang mampu akan membantu siswa yang tidak mampu melalui SPP yang dibayarkan ke sekolah," terangnya.

Dia mencontohkan SMAN di Kota Malang. Menurut dia,

pendidikan di Kota Malang berkualitas karena tidak gratis. Namun, siswa yang tidak mampu bisa membayar sebagian saja. Misalnya, dari SPP Rp 200 ribu per bulan, bisa dibayar Rp 100 ribu saja. Bahkan, ada yang diperbolehkan hanya membayar Rp 50 ribu per bulan. Ada pula yang tidak membayar. "Tidak membayar itu bukan berarti gratis. Namun, ditalangi siswa yang mampu," tambahnya. (kis/c3/dan)